**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor–faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam kegiatan produksi tenaga kerja merupakan input yang terpenting selain bahan baku dan juga modal. Di beberapa negara, tenaga kerja juga dijadikan aset terpenting karena memberikan pemasukan kepada negara yang bersangkutan. Sangat beruntung sekali bagi negara-negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar, karena negara tersebut pasti memiliki jumlah tenaga kerja yang besar pula. Banyaknya pengiriman tenaga kerja inipun yang membuat peneliti ingin menganalisis tingkat kesejahteraan para tenaga kerja yang ada di negara-negara luar, karena banyaknya tenaga kerja terutama tenaga kerja dari Indonesia yang masih belum mengecap tingkat kesejahteraan terutama ketika mereka pulang ke Indonesia ataupun ketika mereka sedang di negara tempat mereka bekerja.

Masalah ketenagakerjaan diakibatkan pencari kerja lebih banyak dibanding kesempatan kerja yang ada, akibatnya terjadi pengangguran. Terbatasnya kesempatan kerja di Indonesia, salah satunya menyebabkan sebagian tenaga kerja bekerja di luar negeri, menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Migrasi Internasional yang semakin tinggi merupakan salah satu sisi positif sebagai akibat terbukanya isolasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik global yang saling bersinggungan.

Fenomena mobilitas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri diakui selain dapat membantu memecahkan masalah ketenaga kerjaan di Indonesia dan meningkatkan devisa negara, secara khusus juga dapat untuk memperbaiki nasib dan membangun diri TKI dan rumah tangganya di daerah asal. Migrasi internasional tenaga kerja Indonesia dapat diartikan sebagai tenaga kerja yang meninggalkan sementara negaranya pindah ke negara lain dengan tujuan mencari penghasilan, meningkatkan status sosial ekonomi, pada saat tertentu kembali ke daerah asalnya dengan membawa terutama uang (remitansi) atau pada saat tertentu mengirimkan uang ke daerah asalnya, dan kembali lagi ke negara tujuan. Dengan kata lain, migrasi luar negeri merupakan usaha tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan status sosial ekonomi di daerah asal, dengan cara meninggalkan Indonesia sementara untuk bekerja di luar negeri (negara tujuan).

Kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi diakibatkan oleh ketidakmerataan distribusi kesempatan dan lapangan pekerjaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan, tuntutan ekonomi yang mendesak, dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja di Indonesia.

Migrasi antarnegara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja, tetapi juga oleh faktor nonekonomi seperti misalnya agama, ras, dan politik. Untuk faktor ekonomi biasanya migrasi didasarkan pada perhitungan pendapatan dan biaya. Harapan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau standar hidup yang lebih baik merupakan tujuan pindah ke tempat atau negara lain. Mereka meninggalkan tempat produktivitasnya relatif rendah pindah ke tempat yang produktivitasnya lebih tinggi mungkin dikarenakan tenaga kerjanya dikombinasikan dengan faktor produksi lainnya yang lebih banyak dan baik kualitasnya.[[1]](#footnote-1)

Jumlah sumber daya manusia yang besar ini harus diakui merupakan potensi besar negara kita yang harus dikelola dengan optimal yang merupakan salah satu alternatif solusi penting bagi proses percepatan pemulihan ekonomi negara kita. Pasar tenaga kerja luar negeri merupakan tantangan dan potensi yang harus segera disambut dengan pengelolaan ketenagakerjaan yang profesioanal, efektif dan efisien. Indonesia memperoleh devisa dari pengiriman tenaga kerja ke manca negara lebih dari Rp 100 triliun setiap tahunnya.[[2]](#footnote-2)

Tenaga Kerja Indonesia atau TKI telah mendapatkan gelar sebagai “pahlawan devisa”. Hal ini terjadi karena salah satu sumber pendapatan devisa negara terbesar berasal dari para Tenaga Kerja Indonesia. Dalam Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Februari 2012, hingga triwulan IV tahun 2011 tercatat surplus sebesar USD 1,2 milliar atau lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD 1 miliar dan penerimaan atas remitansi dari Tenaga Kerja Indonesia membukukan arus masuk sebesar USD 1,7 miliar.

Meskipun devisa yang dihasilkan TKI cukup besar, akan tetapi selama ini kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada mereka. Secara resmi pemerintah, lebih tepatnya Menteri Tenaga Kerja telah menetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep.104 A/MAN/2002 tentang penempatan TKI keluar negeri. Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa penempatan tenaga kerja keluar negeri dilakukan dalam rangka memanfaatkan pasar kerja internasional dengan meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kerja dan disertai dengan perlindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja diluar negeri sampai tiba kembali di Indonesia. Permasalahan perlindungan tenaga kerja Indonesia muncul karena ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi interaksi ekonomi yang terglobalisasi.[[3]](#footnote-3)

Sepanjang tahun pemerintah Indonesia selalu dipusingkan dengan permasalahan TKI. Tidak ada solusi dan kebijakan yang tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan TKI ini. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menuai banyak protes dari banyak kalangan aktivis perempuan, akademis dan pemerhati TKI. Sehingga seolah kebijakan yang sudah ada mengambang begitu saja tanpa tindak lanjut, sementara nasib para TKI semakin tragis dan terkesan dibiarkan.hal ini disebabkan karena masalah kultur yang terkontruksi dalam suatu masyarakat, serta harkat dari perempuan itu sendiri terhadap pemberian kesempatan bekerja bagi perempuan, Berbeda dari kaum laki-laki yang mempunyai kebebasan dalam hal mencari dan memilih pekerjaan. Akan tetapi semua ini juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan makro ekonomi yang diambil pemerintah baik dalam sektor ekonomi maupun sektor industri.[[4]](#footnote-4)

Fenomena banyaknya para tenaga kerja (TKI) menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan itu demikian kronisnya, terbatasnya lahan pekerjaan bagi perempuan di Indonesia menjadikan mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri dengan asumsi mereka hanya ingin mendapatkan pekerjaan dan pengahasilan lebih dari pada yang mereka terima di negeri sendiri. Dan setelah mereka bekerja di luar negeri yang mereka temui justru kekerasan, penyiksaan, pelecehan dan deskriminasi yang tiada henti.

Arab Saudi juga merupakan negara yang memiliki kasus TKI tertinggi. Pada tahun 2011 terdapat sekitar 18.977 kasus TKI yang terjadi di Arab Saudi. Di antara kasus-kasus tersebut, kasus yang menjadi perhatian utama adalah kasus TKI yang mengalami penganiayaan dan TKI yang terancam atau mengalami hukuman mati. Umumnya kasus ini dialami oleh Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja pada sektor domestik seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT). Jenis pekerjaan ini ditempatkan di dalam rumah atau tempat kediaman pribadi yang jauh dari sorotan publik. Karena sifatnya tersembunyi, maka kekerasan dan penganiayaan mudah terjadi namun sulit untuk dikendalikan.[[5]](#footnote-5) Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus yang terjadi dibeberapa tahun terakhir yang secara garis besar akibat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan majikan kepada pekerja yang berujung pada kasus penganiayaan dan pembunuhan. Kasus ini baru diketahui ketika pekerja melarikan diri atau ada pihak yang melaporkannya.[[6]](#footnote-6) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dinilai kurang dengan berbagai macam pelanggaran HAM yang diterima oleh TKI di Arab Saudi. Para TKI menilai mereka kurang diperlakukan dengan baik.

Dalam hal ini, adapun kaitannya dengan Program Studi Hubungan Internasional, adanya ketimpangan dalam perlindungan TKI diluar negeri. Lalu membahas bagaimana kesejahteraan yang dialami oleh para tenaga kerja sendiri di negara yang bersangkutan, karena timbulnya suatu permasalahan yang menyangkut dengan para tenaga kerja akan dihubungkan dengan perhubungan luar negeri negara tersebut dengan Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti mengangkat judul: **KERJASAMA INDONESIA DAN ARAB SAUDI DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA DI ARAB SAUDI**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan diatas, diajukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam melindungi TKI di Arab Saudi?

2. Apa saja masalah-masalah yang dihadapi kedua negara dalam kerjasama Pemerintah Republik Indonesia – Arab Saudi?

3. Sejauhmana program-program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dapat memberikan perlindungan kepada TKI?

**1. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi permasalahan penelitian ini seputar program-program yang diimplementasikan Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi.

**2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu **Bagaimana program-program Pemerintah Republik Indonesia dan Arab Saudi dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi ?**

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan yang akan dicapai dari setiap pembahasan yang akan disusun, diantaranya:

1. Skripsi ini untuk mengetahui, mengeksplorasi dan mendeskripsikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam menyelesaikan permasalahan TKI.
2. Selanjutnya ingin mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan apa saja program-program yang dilakukan dalam melindungi TKI di Arab Saudi dan bagaimana proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh kedua negara agar tidak terjadi kembali hal-hal buruk yang menimpa TKI di Arab Saudi.
3. Menjelaskan sejauhmana dampak dari program-program kerjasama bilateral Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk menyelesaikan permasalahan TKI di Arab Saudi.
4. **Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan dan tujuan masalah diatas makan penelitian ini memiliki kegunaan yang akan dicapai dari setiap pembahasan yang akan disusun, diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional, khususnya yang menyangkut Politik Luar Negeri dan Hukum Internasional.

2. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembuat keputusan terutama di Indonesia, dalam menyikapi dan menangani permasalahan mengenai Tenaga Kerja Indonesia.

1. Nopirin, Ph.D. (1997). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, hal 105 [↑](#footnote-ref-1)
2. Priambada, Briantara Sura. (2014). Pengaruh Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.8 no.1 Maret 2014 [↑](#footnote-ref-2)
3. Prihatin. S Djuni. (2007). Potrem Buram Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.10 no.3 Maret 2007 [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://www.kompasiana.com/khumairoh/banyaknya-tenaga-kerja-wanita-indonesia-dalam-era-globalisasi_57fb8b09d17a61c81d18afbd> diakses 28 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-4)
5. Crisis Center BNP2TKI Tangani 12.270 Pengaduan Permasalahan TKI, BNP2TKI, 2013. Dapat diakses pada <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/8526-crisis-center-bnp2tkitangani-12270-pengaduan-permasalahan-tki.html> diakses 28 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-5)
6. Pengaduan TKI Tertinggi dari Saudi Arabia, PPID BNP2TKI, 2012. Dapat diakses pada <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/component/content/article/74-berita-terkini/343-pengaduan-tkitertinggi-dari-saudi-arabia> diakses 28 Desember 2017 [↑](#footnote-ref-6)